

## INTERNALISASI NILAI DEMOKRASI DAN HUMANISME DALAM PENDIDIKAN ISLAM

**Sri Haryanto**

Program Studi Pendidikan Islam AUD Universitas Sains Al-Qur'an Jawa Tengah,  
Wonosobo, Indonesia

Email: [sriharyanto@unsiq.ac.id](mailto:sriharyanto@unsiq.ac.id)

### ***Abstract***

*This research will examine the internalization of the values contained in the concepts of democracy and humanism in Islamic education. In this study, the author uses a qualitative method, so the data collection method is carried out by library research, while the analysis of the data and information that has been collected uses content analysis techniques.*

*In essence, democracy and humanism are respect for human values, and an understanding that seeks to place humans as humans in accordance with their human nature. These values are important to be implemented in Islamic education, both in curriculum development, learning strategies, teaching staff, evaluation systems, and the application of rewards and punishments. The implementation of the values of humanism and democracy in education has great potential to realize the ideals of national education in order to build a generation of intellectual, emotional and spiritual intelligence, mental and tough spirit, creative and innovative and has the ability to find solutions to the problems of life that are being experienced. .*

**Keywords:** *Democracy, Humanism, Islamic Education*

### **Abstrak**

Penelitian ini akan menelaah internalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam konsep demokrasi dan humanisme dalam pendidikan Islam. Dalam kajian ini, penulis menggunakan metode kualitatif, maka metode pengumpulan datanya dilakukan dengan library research, adapun analisis terhadap data dan informasi yang telah terkumpul menggunakan teknis analisis isi (content analysis).

Pada esensinya demokrasi dan humanisme adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan paham yang berusaha untuk menempatkan manusia sebagai manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan yang dimilikinya. Nilai-nilai tersebut penting untuk diimplementasikan dalam pendidikan Islam, baik dalam pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, tenaga pengajar, sistem evaluasi, dan penerapan ganjaran dan hukuman. Implementasi nilai humanisme dan demokrasi dalam pendidikan ini berpotensi besar untuk mewujudkan cita-cita pendidikan nasional dalam rangka membangun generasi bangsa yang cerdas intelektual, emosional dan spiritual, bermental dan berjiwa tangguh, kreatif dan inovatif serta memiliki kemampuan untuk mencari solusi dari problem kehidupan yang sedang dialaminya.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Humanisme, Pendidikan Islam

## A. PENDAHULUAN

Pendidikan adalah aspek terpenting dalam kehidupan manusia. Kegiatan ini telah ada sejak manusia pertama diciptakan dan akan terus berlangsung hingga berakhirnya kehidupan manusia di dunia ini. Semenjak manusia berinteraksi dengan aktifitas pendidikan, ia telah berhasil merealisasikan berbagai kemajuan dalam semua lini kehidupannya<sup>1</sup>, dan seiring perkembangan zaman aktivitas ini mengalami perkembangan yang signifikan.

Pendidikan pada esensinya adalah aktifitas integral yang mencakup target, tujuan, strategi, dan metode tertentu dalam upaya membentuk manusia utuh yang mampu berinteraksi dan beradaptasi dinamika perkembangan zaman untuk terwujudnya suatu kemajuan.<sup>2</sup> Dalam konsepsi Islam, pendidikan merupakan suatu proses pemberdayaan seseorang (peserta didik) menuju kedewasaan akal, mental maupun moral, sehingga ia mampu memerankan fungsi dan peran kemanusiaannya sebagai hamba dihadapan Tuhan (abdullah), (QS.51:56), dan Duta Tuhan di muka bumi (khalifatullah fil ardh)

(QS.2:30). Oleh sebab itu, Pendidikan Islam dituntut mengembangkan semua potensi anak didik secara holistik dan integralistik selaras dengan fitrah kemanusiaannya, serta memberikan kesadaran akan hakikat dirinya sebagai makhluk terhormat yang diciptakan dengan “ahsana takwim”.

Namun dalam realitasnya, aktivitas pendidikan yang berjalan selama ini belum mampu mencapai tujuan idealnya yakni “memanusiakan manusia.” Pendidikan hingga kini belum mampu mendorong, memahami bahkan memperlakukan manusia (peserta didik), sesuai kodrat kemanusiaannya, eksistensi manusia yang menjadi hak mutlak untuk survive ternyata kabur bersama derasnya arus globalisasi.<sup>3</sup> Kondisi ini dapat disaksikan dari aktivitas pendidikan dan pembelajaran yang masih cenderung menempatkan anak didik sebagai objek pendidikan yang diposisikan sebagai makhluk lemah dan tidak tahu apa-apa, sehingga perlu dikasihani, dijejali dan disuapi beragam pengetahuan dan bahkan indoktrinasi-indoktrinasi.

Bahkan sekolah sebagai ujung tombak pendidikan juga masih memiliki pandangan bahwa tujuan dan target aktivitas belajar

---

<sup>1</sup> Abdurrahman Ibnu Al Khaldun, *Muqaddimah*, (Beirut: Daar alFikr, 1998), hlm. 412

<sup>2</sup> Buan Irsyad Syafar, *Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas Jurnal OASE*, eds. 16 th. 2000, hlm. 10

---

<sup>3</sup> Ibrahim Sulaiman, *Pendidikan sebagai Imperealisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), hlm. 81.

adalah dalam rangka menghadapi ujian. Ujian dijadikan sebagai barometer sekaligus target tertinggi yang harus dikuasai dengan segala cara, dampaknya makna belajar menjadi sangat dangkal “hanya untuk menghadapi ujian.” Sekolah sebagai garda terdepan pendidikan telah melupakan pentingnya mengembangkan potensi-potensi peserta didiknya dengan optimal.

Pada sisi lain, tindak kekerasan dan penyimpangan perilaku juga semakin marak, belum lama ini dunia pendidikan tercoreng oleh kasus kekerasan di IPDN, STIP, geng motor, dan tawuran antar pelajar dan bahkan mahasiswa. Sebelumnya, berbagai kasus kekerasan belum lepas dari ingatan kita, sebut saja kasus Unas dan Monas, Geng Nero menambah deret panjang perilaku kekerasan dalam dunia pendidikan. Bahkan perguruan tinggi yang seharusnya menjadi lembaga terdepan untuk mencetak generasi unggul dan anggun dalam moral dan intelektual, ternyata juga tercemar tindakan kekerasan, brutalisme, vandalisme, dan tindakan tak bermoral lainnya yang menodai nilai-nilai kemanusiaan. Semua itu menjadi bukti apabila pendidikan belum mampu berperan secara maksimal dalam proses membangun kepribadian generasi muda bangsa yang demokratis, humanis dan qur’ani, bahkan pandangan simplistik

mengatakan, aktivitas pendidikan telah mengalami “dedemokrasi” dan “dehumanisme”. Berdasar pemikiran diatas, penelitian ini akan menggali dan menelaah nilai-nilai yang terkandung demokrasi dan humanisme untuk dinternalisaskaikan dalam aktivitas pendidikan Islam.

Penelitian ini adalah penelitian library re-search. Penelitian yang dilakukan dengan cara menelusuri dan mengumpulkan data teoritis dengan memilih literatur yang relevan dengan obyek yang diteliti. Literatur berupa primary source dan secondary source. Sumber primer dalam penelitian ini adalah tulisan atau karangan yang ditulis oleh seorang yang terlibat langsung, seperti catatan harian, tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Sedagng sumber sekunder adalah literatur yang tidak langsung dialami oleh penulis, seperti tinjauan, ringkasan, kritikan dan sebagainya. Sedangka untuk menganalisis data dan informasi yang telah terkumpul penulis menggunakan metode analisis isi (content analysis), yakni menganalisis makna yang terkandung dalam sebuah ide, gagasan, asumsi, atau statemen untuk mendapatkan pemahaman yang utuh dan kesimpulan komprehensif.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1997), hlm. 85.

## B. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Islam dan Demokrasi

Gagasan demokrasi hingga saat ini masih menjadi pembicaraan hampir di seluruh belahan dunia. Demokrasi diakui sebagai gagasan positif yang mesti diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Pada esensinya, gagasan demokrasi menekankan pada kekuasaan mutlak di tangan rakyat, dikatakan dalam pepatah latin “*vox populi vox Dei*”.<sup>5</sup> Karenanya dalam system demokrasi disepakati hukum tertinggi adalah kehendak rakyat. Dalam konsep demokrasi ini terdapat tiga kata kunci yang menjadi landasan utamanya yakni “*freedom, equality dan fraternity*”<sup>6</sup>. Sebagaimana yang dijelaskan Amin Rais<sup>7</sup> bahwa esensi dari demokrasi adalah kebebasan berpendapat; kebebasan beragama; kebebasan dari ketakutan, kebebasan dalam berpartisipasi politik, kebebasan untuk menentukan nasibnya sendiri; dan keseimbangan serta tegaknya hukum.

---

<sup>5</sup> M. Amin Rais, *Masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia, Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun*, No. 1. Th 1, 1998, hlm. 7.

<sup>6</sup> Yedi Purwanto. *Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu, Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 16. Th.8 April 2009, hlm. 31)

<sup>7</sup> M. Amin Rais, *Masalah...* Hlm.6,

Dalam literatur Islam, ide tentang demokrasi ini sebenarnya telah teraplikasikan sejak zaman Rasulullah, ketika beliau menjalankan pemerintahan di Madinah. Tidak diragukan, “Negara Madinah” adalah satu contoh negara yang menerapkan demokrasi, dan pada masa yang sama tidak terpisah daripada agama. Sistem demokrasi pada masa awal Islam menunjukkan hubungan antara kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam. Dengan begitu, demokrasi yang dikembangkan di dunia barat yang berlandaskan pada kekuasaan rakyat secara mutlak, berbeda dengan demokrasi Islam, karena dalam demokrasi Islam kedaulatan rakyat harus tunduk dan tidak bertentangan dengan sumber hukum Islam (*al-Qur’an dan Hadist*). Sejalan dengan yang dinyatakan Othman Alias<sup>8</sup> yang menegaskan bahwa kebebasan atau kedaulatan rakyat dalam demokrasi Islam adalah kebebasan mendapat hak; kebebasan pribadi; kebebasan beragama; kebebasan politik; dan kebebasan hak milik.

Dapat ditegaskan bahwa dalam *al-Qur’an* telah tertanam prinsip dan tata nilai yang berkaitan dengan demokrasi seperti *al-‘adl* (QS.5:8), *al-musawa* (QS.49:13), *al-*

---

<sup>8</sup> Othman Alias, *Asas-Asas Pemikiran Politik Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Islam Sdn, 1991), hlm. 105.

huriyya (QS.3:110), dan asy-syura' (QS.3:159). Maka dapat disimpulkan jika Islam tidak anti demokrasi, akan tetapi Islam adalah risalah yang sejalan dengan nilai-nilai demokrasi, yang terbukti dengan banyaknya prinsip dan nilai demokrasi yang sejalan dengan ajaran Islam. Sampai-sampai tokoh sekaliber Mohammad Natsir<sup>9</sup>, menyatakan "Islam bersifat demokratis".

## 2. Islam dan Humanisme

Humanisme merupakan istilah yang seperti ,digunakan dalam berbagai bidang pendidikan ,bidang filsafat dan literatur. Pemikiran ini muncul pada Abad pencerahan (aufklarung) dimana ketika itu agama "digerogoti" dan dikeluarkan dari wacana keilmuan dan keduniawiaan. Humanisme merupakan gagasan monumental dan fundamental bagi renaissans, yang dijadikan acuan dalam meriset interpretasi tentang hakikat manusia.

Dalam Islam humanisme dieksplorasikan dengan mengembalikan pemaknaan agama terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Manusia adalah tokoh central dalam kehidupan, maka ia harus ditempatkan sebagai subjek sekaligus objek proses humanisasi. Ini artinya, humanisme Islam dipahami sebagai konsep dasar

kemanusiaan yang tidak berdiri dalam posisi bebas, akan tetapi terkait secara teologis. Konsep dasar humanisme dalam Islam ini dapat ditilik pada sumber Islam (al-Qur'an). Dalam Qur'an surah al-Baqarah ayat ke 30-32 secara implisit menyiratkan substansi nilai-nilai humanisme yakni, Manusia adalah mahluk terbaik; keberadaan manusia dengan tujuan agar menjadi hamba dan duta Allah; dan manusia adalah pribadi yang menanggung konsekuensi atas perbuatan yang dilakukannya.

Prinsip-prinsip humanisme Islam dapat ditemukan dalam al-Qur'an seperti anjuran saling mencintai, saling mengasihi dan saling menjaga kebersamaan, (QS.49:10), anjuran untuk berpegang teguh pada risalah Ilahiah, menghindari perselisihan, bersatu dan tidak bercerai-berai (QS. 3:103), perintah untuk membangun hubungan baik dengan sesama manusia dengan jalan saling kenal mengenal, saling berbuat baik, saling mengasihi dan bersikap adil terhadap siapapun, (QS.49:13), menjamin kebebasan beragama (QS.2:256), saling menghormati dan menjunjung kehormatan diri dan menjaga hak orang lain. Prinsip-prinsip ini melekat dengan kehidupan umat Islam, yang tercermin disaat seorang muslim mengerjakan shalat, yang diawali dengan memutuskan hubungan

---

<sup>9</sup> Mohammad Natsir, *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Media Dakwah, 2001), hlm. 89)

duniawi, dan diakhiri dengan salam dan doa keselamatan untuk sesama. Memberi salam dan mendoakan kedamaian kepada orang lain merupakan cerminan kepedulian serta kasih sayang terhadap sesama.

Dapat dipahami, Islam sejalan dan mendukung humanisme dan bahkan menurut Kuntowijoyo<sup>10</sup>, “humanisme merupakan nilai inti (core-value) dari seluruh ajaran Islam”, karena sejatinya Agama untuk manusia, bukan untuk Tuhan. Pengamalan agama disamping sebagai wujud ketaatan terhadap Tuhan, juga untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan dan segala bentuk penindasan. Humanisme dalam Islam ini menurut Kuntowijoyo<sup>11</sup> disebut “humanisme teosentris.” Humanisme teosentris sejatinya merupakan aktualisasi iman dalam amal saleh. Iman dan amal saleh ini merupakan pokok ajaran islam yang merupakan satu kesatuan dan tak terpisahkan.

### **3. Internalisasi Nilai Demokrasi dan Humanisme dalam Pendidikan Islam**

#### **a. Desain Kurikulum**

Istilah kurikulum awalnya dipergunakan dalam dunia raga yang berarti “a little racecourse” (jarak yang ditempuh

dalam pertandingan olah raga). (Abd. Azis, 2009:155). Dalam Islam kurikulum dikenal dengan istilah “manhaj” yakni jalan terang yang dilalui pendidik dan peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap.<sup>12</sup> Kurikulum merupakan unsur penting dan strategis dalam system pendidikan. Sebab didalam kurikulum berisikan rumusan tujuan akan dicapai, materi yang akan diajarkan, cara mempelajarinya atau metode yang akan diterapkan, serta cara mengetahui hasilnya aktivitas pendidikan.<sup>13</sup>

Kurikulum memiliki peran penting sebagai pedoman dalam memberikan arah terhadap pencapaian tujuan pendidikan pada semua jenjang dan tingkatan, karenanya perubahan dan pengembangan kurikulum pendidikan adalah hal wajar, dan bahkan suatu keharusan. Ini artinya, kurikulum harus senantiasa dikembangkan dan disempurnakan agar tetap sejalan dengan perkembangan zaman. Hal ini pula yang terjadi pada perubahan dan pengembangan kurikulum dalam sistem pendidikan nasional, yang tercatat hingga akhir abad 21 ini telah lebih dari tujuh kali perubahan

---

<sup>10</sup> Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, (Bandung: Mizan, 1993), hlm. 229.

<sup>11</sup> Ibid, hlm. 229

---

<sup>12</sup> Oemar Muhamad al Taomy Syaibani, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hlm. 478

<sup>13</sup> Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*, (Bandung: Rosda, 2000), hlm. 110.

kurikulum, dari kurikulum 1962, berubah menjadi 1968, 1975, 1984, 1994, 2004 (KBK), selanjutnya muncul kurikulum 2006 (KTSP), dan saat ini sistem pendidikan nasional telah mencangkan kurikulum merdeka belajar.

Adanya perubahan kurikulum hingga sekarang, tampak belum memberikan dampak signifikan bagi pembangunan generasi muda bangsa sebagaimana yang dimanatkan undang-undang, bahkan sebaliknya dalam perubahan kurikulum masih terlihat adanya degenerasi dalam hal tujuan pendidikan, ini dapat diketahui dengan semakin etatifnya praksis pendidikan, dimana dalam tataran praksisnya pendidikan semakin tidak berorientasi pada anak didik tetapi lebih pada impuls kepentingan politik praktis.<sup>14</sup>

Berdasarkan asumsi diatas, maka perlu adanya pengembangan kurikulum yang mengadopsi nilai-nilai demokrasi dan humanisme. Kurikulum yang menyediakan ruang bagi eksplorasi masalah kemanusiaan, kurikulum holistik dan integralistik dalam pengembangan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, kurikulum berupaya menguatkan kecerdasan intelektual,

emosional dan spiritual peserta didik. Kurikulum yang didasarkan atas pemahaman yang utuh akan hakikat manusia sebagai makhluk multidimensional, makhluk yang mempunyai potensi, kemampuan, dan kekuatan yang dapat dikembangkan dengan optimal. Ini sejalan dengan pandangan John Dewey, yang mengatakan, pengembangan kurikulum pada semua jenjang dan tingkatan perlu memperhatikan tiga hal, Pertama, hakikat anak didik; Kedua, hakikat dan kebutuhan masyarakat; dan Ketiga, problematika yang dihadapi peserta didik dalam upaya mengembangkan diri sebagai pribadi matang yang mampu menjalin hubungan dengan masyarakatnya secara aktif dan konstruktif.<sup>15</sup>

Kurikulum berbasis nilai-nilai demokrasi dan humanisme ini menuntut hubungan emosional yang baik antara pendidik dan peserta didiknya. Pendidik selain harus dituntut menciptakan hubungan baik dan akrab dengan peserta didiknya, pendidik juga berperan sebagai motivator dan inspirator bagi terciptanya hubungan yang harmonis. Selain itu, kurikulum berbasis nilai-nilai demokratis dan humanistik juga menuntut setiap kegiatan

---

<sup>14</sup> ST. Sularto, *Praksis Pendidikan Minus Visi: Catatan atas Bongkar Pasang Kurikulum*, (Kompas, Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka), (Jakarta: 16 Agustus 2005), hlm. 53.

---

<sup>15</sup> Yunus Firdaus, *Pendidikan Berbasis Realitas Sosial; Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004) hlm, 110.

atau aktivitas pendidik adalah kegiatan positif, konstruktif dan bermanfaat bagi peserta dalam membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimilikinya.<sup>16</sup>

Kurikulum berbasis nilai-nilai demokratis dan humanisme ini diharapkan dapat menjadi solusi strategis atas problem yang dihadapi dunia pendidikan saat ini, terutama problem moralitas. Ini artinya, kurikulum harus menyajikan materi yang memungkinkan bagi tumbuhnya karakter positif, sikap kritis, kepedulian sosial, kesadaran akan penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan kesadaran akan adanya perbedaan antar individu, dan seterusnya. Dengan begitu, kurikulum benar-benar menyediakan pengalaman dan pengetahuan berharga bagi peserta didik untuk mengembangkan aspek kognitif, afektif dan psikomotorik, yang diarahkan pada pertumbuhan integritas, otonomi kepribadian, karakter dan sikap mental yang positif terhadap diri dan lingkungan sosial menuju terciptanya manusia ideal (insan kamil).

#### **b. Guru Demokratis dan Humanis**

Amir Dien Indrakusuma<sup>17</sup>, mendefinisikan pendidik “sebagai pihak yang mendidik, pihak yang memberikan anjuran-anjuran, pengetahuan dan kecakapan, serta pihak-pihak yang turut menghumanisasikan anak”. Dalam literatur Islam pendidik adalah orang-orang yang bertanggung jawab atas perkembangan potensi afektif (rasa), kognitif (cipta), maupun psikomotorik (karsa), sesuai dengan ajaran-ajaran Islam.<sup>18</sup> Dalam Islam, Pendidik merupakan profesi mulia, bahkan Islam memandang jika pendidik (guru/ulama) sebagai “warasatul ‘anbiya”

Pendidik merupakan komponen utama dalam peningkatan kualitas dan mutu pendidikan (Undang-Undang R.I. 2005:2), kualitas dan mutu pendidikan akan sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh kualitas dan mutu pendidiknya, sebab pendidik adalah ujung tombak sekaligus sebagai central of education. Dalam konteks ini, Aqib<sup>19</sup> menyatakan, pendidik adalah faktor kunci bagi keberhasilan pendidikan, karena ia adalah tokoh sentral (utama) dalam pendidikan yang memiliki pengaruh sangat

---

<sup>16</sup> Ibid, hlm. 90-91

---

<sup>17</sup> Amir Dien Indrakusuma, *Pengantar Ilmu Pendidikan*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1973), hlm. 134

<sup>18</sup> Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: CiputatPers, 2002). Hlm. 41

<sup>19</sup> Zainal Aqib. *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*, (Surabaya: Cendekia, 2002) hlm. 22.

besar terhadap mutu pendidikan (Ace Suryadi,1993:111).

Dalam aktivitas pendidikan, Pendidik memainkan peran ganda yakni pengajar sekaligus pendidik, baik mengajar maupun mendidik merupakan tugas dan tanggung jawab guru sebagai tenaga profesional. (Djamarah,2002:74). Sebagai pengajar, pendidikan berperan dalam menyampaikan materi pembelajaran pada anak didiknya, sebagai pendidik, Ia berkewajiban untuk membimbing, membina dan mengarahkan anak didiknya agar menjadi pribadi yang cakap, aktif, kreatif dan mandiri.

Dalam konteks pendidikan berbasis nilai-nilai demokratis dan humanisme, pendidik selain berperan sebagai pendidik dan pengajar, Ia juga dituntut untuk memerankan fungsinya sebagai fasilitator, motivator, mediator, counselor dan motivator.

Pertama, fasilitator, pendidik adalah fasilitator dalam pengembangan ranah kognitif, afektif, psikomotorik, dan konatif peserta didiknya. Sebagai fasilitator ia dituntut untuk terus memberikan dorongan (motivasi), dan membangun kehendak dan kesadaran akan makna belajar bagi peserta didiknya. Tugas pendidik dalam hal ini

adalah “to facilitate of learning”<sup>20</sup> yakni memberi dan memfasilitasi aktivitas belajar peserta didik, bukan hanya menyampikan materi-materi pembelajaran yang membosankan.

Kedua, mediator, sebagai mediator pendidik dituntut memiliki pengetahuan yang memadai tentang media-media pendidikan agar aktivitas belajar dan mengajar dapat berjalan efektif. Sebagai mediator seorang pendidik meski hadir ditengah-tengah anak didiknya, memotivasi peserta didiknya dan membangun interaksi yang positif, harmonis dan konstruktif.<sup>21</sup>

Ketiga, motivator, pendidik dalam perannya sebagai motivator senantiasa menjaga dan memberikan dorongan agar peserta didiknya tetap bersemangat mengikuti aktivitas belajar.

Keempat, kounselor, pendidik menjadi tempat berbagai (berdiskusi) bagi peserta didik yang mengalami problem belajar, membantu mencari solusi atas problem, dan membantu memperbaiki kesalahan yang dilakukan peserta didiknya. Disini pendidik dituntut untuk mampu mengidentifikasi,

---

<sup>20</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya 2007) hlm. 54

<sup>21</sup> A Syukur Ghazali, Ghazali, *Strategi Belajar Kooperatif dalam Belajar Mengajar Konteksstual*, *Jurnal Pendidikan & Pembelajaran*, Vol. 9, No. 1, (April 2002). Hlm. 53.

mendiagnosa, memprognosa dan membantu pemecahan problem yang dihadapi peserta didiknya.

Kelima, evaluator, pendidik dalam pembelajaran melakukan evaluasi sesuai indikator dan target capaian yang telah ditetapkan dengan adil serta obyektif.<sup>22</sup>

Disamping beberapa hal diatas, pendidik juga harus mampu menyajikan materi belajar yang imajinatif, kreatif dan inovatif. Ini dimaksudkan agar kegiatan belajar mengajar lebih bermakna sehingga menghasilkan output yang berkualitas. Pendidik juga harus menaruh kepercayaan penuh bahwa peserta didiknya mampu mempelajari materi, memberikan pujian kepada yang berhasil, dan memotivasi peserta didik yang lamban dalam belajar.

Sementara hubungan antara pendidik dan peserta didik terjalin dalam nuansa dialogis. Pendidik bagi peserta didiknya adalah partner, teman dialog di dalam memahami realitas, keduanya sama-sama diletakkan sebagai subjek pendidikan yang sadar akan dirinya, yang sama-sama ingin mengetahui lebih banyak realitas dan pengetahuan sebagai objeknya. Keduanya saling belajar satu sama lain, saling

---

<sup>22</sup> Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Bandung: Rosda Karya, 2007), hlm. 62.

memanusiakan, dan saling memberi kebebasan. Sehingga dalam pendidikan yang demokratis dan humanistik tidak ada istilah pengkultusan terhadap pribadi seseorang. Pendidik disini bukan sosok “yang paling”

### c. Desain Pembelajaran

Pembelajaran adalah interaksi pendidik dengan peserta didik dalam rangka mengkaji dan mendiskusikan suatu bahan atau materi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Mulyasa<sup>23</sup>, mendefinisikan sebagai proses yang kompleks yang melibatkan berbagai aspek. Sementara Oemar Hamalik<sup>24</sup>, memaknai pembelajaran sebagai “suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur, yang saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran”. Ahmad Sugandi<sup>25</sup>, menyebut pembelajaran sebagai perpaduan dua aktivitas “aktivitas mengajar” dan “aktivitas belajar”.

Pembelajaran merupakan inti pendidikan, dengan pendidik sebagai peran utama. Sebagai sebuah proses pembelajaran menurut Ahmad Sugandi<sup>26</sup>, pembelajaran

---

<sup>23</sup> Ibid, hlm 6

<sup>24</sup> Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1995), hlm. 70.

<sup>26</sup> Achmad Sugandi, *Belajar dan Pembelajaran*, ( Semarang: IKIP PRESS, 2004), hlm. 4

memiliki beberapa karakteristik, Pertama, dilakukan dengan sadar dan terencana; Kedua, menumbuhkan motivasi belajar bagi belajar; Ketiga, tersedianya materi (bahan belajar) yang menarik, Keempat, memanfaatkan media pembelajaran yang tepat, Kelima, menciptakan suasana belajar aktif dan kondusif. Proses pembelajaran akan sangat mempengaruhi hasil belajar anak didik, proses yang baik, tertstruktur, terencana dan sistematis akan menghasilkan output yang baik, sebaliknya pembelajaran yang dilakukan tanpa perencanaan yang baik, maka output pembelajaran juga akan kurang memuaskan.

Dalam implementasi pembelajaran selama ini masih berlangsung sangat monolitik, membosankan dan kurang optimal untuk membantu peserta didik mengembangkan potensi-potensinya. Peserta didik dipandang sebagai obyek pembelajaran, pola pembelajaran juga masih bersifat “teacher centris” yang lebih menekankan pada peran guru sebagai pihak yang paling berwenang dalam menyampaikan ilmu. Dengan kata lain, pembelajaran yang berlangsung hingga saat ini kurang demokratis dan tidak humanis. Atas dasar itu, maka penting adanya pembaharuan dalam aktivitas belajar dan mengajar, perubahan dari pembelajaran

model konvensional, pada model pembelajaran yang demokratis dan humanistik sebuah aktivitas pembelajaran yang memberi ruang bagi anak didik untuk melakukan tindakan belajar, berimajinasi, mengembangkan kreativitas, dan kemampuan berpikir kritis-analitis, aktivitas pembelajaran yang menempatkan dan memperlakukan anak didik sebagai manusia utuh yang didalam dirinya tersimpan beragam potensi luar biasa yang dapat dikembangkan secara optimal.

#### **d. Sistem Evaluasi**

Perwujudan pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi dan humanisme dapat dimulai dengan mendesain ulang salah satu komponen pendidikan yakni “evaluasi”.<sup>27</sup> Evaluasi menurut Suharsini Arikunto<sup>28</sup>, adalah “proses untuk menentukan nilai segala sesuatu yang ada hubungannya dengan pendidikan”. Dalam konsepsi pendidikan Islam, evaluasi merupakan penetapan baik dan buruk, memadai atau kurang memadai terhadap sesuatu berdasarkan kriteria tertentu yang telah

---

<sup>27</sup> Depdiknas, *Pelayanan Profesional Kurikulum 2004*, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004). hal. 11.

<sup>28</sup> Suharsini Arikunto, *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, (Jakarta: Bumiaksara, 1993), hlm. 1

ditetapkan serta dapat dipertanggung jawabkan.<sup>29</sup>

Evaluasi dalam perspektif pendidikan berbasis nilai-nilai demokrasi dan humanisme mensyaratkan agar evaluasi dilaksanakan dengan adil dan obyektif. Evaluasi yang adil tidak dipengaruhi oleh faktor keakraban (hallo effect), memiliki kriteria yang jelas dan menggunakan instrument yang tepat, sehingga evaluasi yang dilakukan benar-benar dapat menunjukkan hasil belajar peserta didik sebagaimana adanya (obyektif).<sup>30</sup> Selain adil dan obyektif, evaluasi juga harus dilaksanakan dengan utuh, artinya mencakup aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Sebab jika evaluasi hanya menekankan pada ranah kognitif, dengan mengabaikan ranah afektif dan psikomotorik akan mengebiri hakikat manusia sebagai makhluk holistik dan integralistik.

Dalam perspektif pendidikan berbasis nilai demokrasi dan humanisme pelaksanaan evaluasi juga harus berjalan dua arah, artinya pendidik mengevaluasi peserta didik dan peserta didik mengevaluasi pendidiknya. Evaluasi dua arah ini tidak

terlepas dari pandangan bahwa peserta didik adalah pusat dari aktivitas pendidikan, mereka adalah individu-individu merdeka yang memiliki otoritas untuk mengambil keputusan yang didasari sikap tanggungjawab.

#### **e. Penerapan Reward dan Punishment**

Reward dan punishment dapat diterapkan dalam aktivitas pendidikan, tetapi dilakukan dengan tujuan dan cara yang edukatif dan padagogis (Mas'ud, 2000: 172). Ganjaran berguna untuk penguatan perilaku positif yang dilakukan anak didik, wujud gajaran seperti menghargai, memuji, mencium, bertepuk tangan dan sampai pada memberi hadiah berupa materi. Sementara hukuman dalam pendidik bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah berlanjutnya perilaku negatif peserta didik, yang dilakukan dalam bentuk mengacuhkan, membentak, menghardik, menasehati, sampai pada hukuman fisik.

Hukuman sebagai upaya perbaikan dilakukan secara bertahap, yakni dari yang paling ringan hingga yang paling keras, dimulai dengan menunjukkan kesalahan, memberikan pengarahan dengan tutur kata yang lembut dan tidak mencela, apabila belum cukup selanjutnya ditunjukkan dengan nada "kecaman" dan seterusnya. Sedang hukuman fisik diberikan sebagai

---

<sup>29</sup> Abd. Azis, *Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 155

<sup>30</sup> Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 62.

tahapan paling terakhir. Namun dalam perspektif pendidikan Islam berbasis nilai-nilai demokrasi dan humanisme penghargaan (reward) harus diutamakan daripada hukuman (punishment). Penghargaan akan memotivasi anak didik menjadi lebih giat belajar. Sebaliknya hukuman apapun bentuknya akan menimbulkan penderitaan, ketakutan, perasaan tidak nyaman, mengubur sikap optimisme dan keberanian anak didik. Hal ini tidak berarti punishment tidak penting, punishment tetap penting diterapkan untuk memberi efek jera dalam batasan kewajaran, proporsional dan dilakukan metode yang tepat.

### C. KESIMPULAN (1.5 line spacing)

Esensinya dari demokrasi dan humanisme adalah penghormatan terhadap nilai-nilai kemanusiaan, dan sebagai gagasan yang berusaha menempatkan manusia selaras dengan kodrat kemanusiaanya, yakni makhluk unik, kompleks dan multidimensional, yang dicipta Allah untuk mengemban amanah sebagai hamba sekaligus duta-Nya di muka bumi.

Nilai-nilai demokrasi dan humanisme penting diinternalisasikan dalam praksis pendidikan Islam, baik dalam pengembangan kurikulum, strategi

pembelajaran, paradigma pendidik, sistem evaluasi, penerapan reward dan punishment. Implementasi dan internalisasi nilai-nilai humanisme dan demokrasi dalam pendidikan ini memiliki potensi besar untuk dapat mencetak generasi bangsa yang cerdas nalar, cerdas emosional, dan cerdas spiritual. Generasi muda bangsa yang tangguh dan teguh dalam prinsip, berjiwa besar, kreatif, inovatif dan mampu mengatasi problematika hidup dengan lebih arif dan bijaksana, sehingga mampu memerankan fungsi dan perannya sebagai abd (hamba) sekaligus khalifah (wakil) Tuhan di muka bumi.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al Khaldun, Abdurrahman Ibnu. (1998). *Muqaddimah*. Beirut: Daar alFikr.
- Aqib, Zainal. (2002). *Profesionalisme Guru dalam Pembelajaran*. Surabaya: Cendekia.
- Arikunto, Suharsini. (1993). *Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Bumiaksara.
- Azis, Abd. (2009). *Filsafat Pendidikan Islam; Sebuah Gagasan Membangun Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Teras.
- Buan Irsyad Syafar. (2000). "Orientasi Pembaharuan Pendidikan dalam Tantangan Modernitas" *Jurnal OASE*, eds. 16 th. 2000.
- Depdiknas, Pelayanan Profesional Kurikulum 2004, (Jakarta: Pusat Kurikulum, Balitbang, 2004).
- Depdinas, (2007). *Gagasan Kurikulum Masa Depan*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Pusat Kurikulum.

- Effendy, Bahtiar. (2008). "Mohamad Roem, Islam dan Demokrasi untuk Membangun Indonesia," *Annual Lecture*, FEIS UIN Jakarta
- Firdaus, M. Yunus. (2004). Pendidikan Berbasis Realitas Sosial; Paulo Freire dan Y.B. Mangunwijaya. Yogyakarta: Logung Pustaka.
- Ghazali, A. Syukur (2002). "Strategi Belajar Kooperatif dalam Belajar Mengajar Konteksstual "Jurnal Pendidikan & Pembelajaran, Vol. 9, No. 1, (April 2002)
- Hamalik, Oemar. (1995). *Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta: Bumi Aksara
- Harefa, Andrias. (2000). *Menjadi Manusia Pembelajaran*. Jakarta: Kompas.
- Indrakusama, Amir Dien. (1973). *Pengantar Ilmu Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional
- Kreamer, Joel L. (2003). *Renaisans Islam*, Mizan, Bandung.
- Kuntowijoyo, (1993). Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi. Bandung: Mizan.
- Media Indonesia. (2008). "Kekerasan dalam Pendidikan" dukutip dari <http://mediaindonesia.com/> accessed 20 Oktober.
- Miramba, Ahmad D. (1980). *Pengantar Filsafat Pendidikan Islam*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Muhaimin, (2003). *el-Hikmah; Jurnal Pendidikan* Malang: Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Indonesia Vol. 1 No. 1.
- Mujai, Saiful. (1995). "Demokrasi dan Retorika Kelompok Dominan" *Harian Republika*, Jakarta: 4 Agustus 1995.
- Mulyasa. (2007). *Menjadi Guru Profesional: Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*, Bandung: Rosda Karya.
- Mulyasa. (2007). *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*. Bandung: Rosdakarya
- Natsir, Mohamad. (2001). *Agama dan Negara dalam Perspektif Islam*. Jakarta: Media Dakwah.
- Nizar, Samsul. (2002). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: CiputatPers.
- Othman, Alias. (1991). *Asas-Asas Pemikiran Politik Islam*, Kuala Lumpur: Pustaka Islam Sdn.
- Purwanto, Yedi. (2009) "Masa Depan Partai Politik Islam dalam Pertarungan Pemilu", *Jurnal Sosioteknologi*, Edisi 16. Th.8 (April 2009).
- Rais, M. Amin. (1998). "Masalah-masalah yang dihadapi Bangsa Indonesia" *Jurnal Milenium: Agama dan Tamaddun*, No. 1. Th 1.
- Shafi, Ali. (2003). *Kisah-Kisah Imam Ali*. Bandung: Lentera.
- Sugandi, Achmad. (2000). *Belajar dan Pembelajaran*. Semarang:IKIP PRESS.
- Sukmadinata. (2000). *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktik*. Bandung: Rosda.
- Sulaiman, Ibrahim. (2000). *Pendidikan sebagai Imperealisme dalam Merombak Pola Pikir Intelektualisme Muslim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sularto, ST. (2005). "Praxis Pendidikan Minus Visi: Catatan atas Bongkar Pasang Kurikulum," *Kompas*, Suplemen 60 Tahun Indonesia Merdeka, Jakarta: 16 Agustus 2005.
- Suryabrata, Sumadi. (1997). *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syaibani, Oemar Muhamad al Taomy. (1997). *Filsafat Pendidikan Islam*, Jakarta: Bulan Bintang.

- Tilaar, H.A.R. (1993). *Analisis Kebanyakan Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Undang-Undang R.I. (2005). Nomor. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen.
- Zuhairini. (1992). *Sejarah Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.